

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggito,Albi, Setiawan,Johan. September (2018). Metodologi penelitian kualitatif. CV Jejak.
- Hadikusuma,Hilman. (2001). Hukum perekonomian adat Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kurniawan,Imam. (2023). Hakikat, Etika, dan Filsafat Komunikasi dalam Dinamika Sosial, Jakarta Selatan. Mahakarya Citra Utama Group.
- Nur'aini. (2022). PATOLOGI DAN REHABILITASI SOSIAL (Case Method dan Team Based Project). Eureka Media Aksara.
- Purnomo,Dwi. (2021). Keterampilan Guru dalam Berprofesi. MNC Publishing.
- Purwati,Ani. 2020. Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek. Surabaya : CV. Jakad Media Publishing.
- Soekanto,Soejono. (2007). Pengantar Penelitian Hukum, UI Press. Jakarta.
- Suprayogo,Imam&Tobroni. (2003). Metode Penelitian Sosial-Agama. Bandung: PT. Remaja Karya.
- Waluyo,Bambang. (2023). Sistem Pemasarakatan di Indonesia. Sinar Grafika.

Jurnal

- Benuf,Kornelius, Azhar Muhamad. Juni (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Volume 7 Edisi I. Jurnal Gema Keadilan.
- Hardiyanto,Agus.R.B Sularto.Purwoto.(2013). Upaya Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Warga Binaan Di Lembaga Pemasarakatan Kelas Ii Beteng Ambarawa.Volume 1.Nomer 2.
- Hiro,Tompodung. (2021). Meiske Sondakh. Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian. Lex Crimen Vol. X/No. 4.
- Hudha,Nurul. Hidayati,Rahmatul. Parmono,Budi. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dari Kekerasan Dalam Lembaga Masyarakat (LAPAS). Dinamika. Vol 30, No 1.
- Jafar,Wahyu Abdul. (2018). FIQH SIYASAH DALAM PERSPEKTIF -QUR'AN DAN AL-HADIST. AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 3, No. 1.
- Pramudhito Yoga Adi. (2021). Efektivitas Lembaga Pemasarakatan Dalam Membina Narapidana Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Pustaka. Jurnal Yustisiabel Volume 5 Nomor 1.
- Prastini,Endang.(2018) kebijakan kriminal pemerintah terhadap kejahatan dunia maya (cyber crem) volV/No-02.

- Wardah, Neli Nailul. (2018). Sistem Informasi Masuk Keluar Tahanan Dan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara (rutan) Kelas II B Pandeglang Banten. Jurnal SITUSTIKA Volume 2 Nomor 1.
- Yusriani Nia Ananda, Anwar Umar. (2022). Upaya Pencegahan Tindak Kekerasan Antar Warga Binaan Pemasyarakatan Di LAPAS Kelas II A Jambi. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2.

Website

- Anugrahdwi. (2023). Hukum Hak Asasi Manusia (HAM). Program Pascasarjana UMSU. (<https://pascasarjana.umsu.ac.id/mengenal-hukum-hak-asasi-manusia-2/>). Diakses 3 Januari 2025.
- Cabhara News. (2024, September, 11). Tewasnya Napi di LAPAS IIA Pangkalpinang Diduga Akibat Penganiayaan, Pengawasan Petugas di Pertanyakan. (<https://cakrabhayangkaraneews.com/tewasnya-napi-di-LAPAS-kelas-ii-a-pangkalpinang-diduga-akibat-penganiayaan-pengawasan-petugas-dipertanyakan/>). Diakses pada 09 November 2024
- Djodi Firmansyah. (2023) Peran Dan Upaya LAPAS Kelas IIA Mataram Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Penganiayaan Antar-Narapidana. (<https://eprints.unram.ac.id/38833/2/JURNAL%20DJO%20DI.pdf>). Di akses 8 Januari 2025.
- http://repositori.uinalauddin.ac.id/17828/1/Fikih%20Siyasah_Fatmawat%20Hilal.pdf. di akses pada September 26. 2024.
- IswinarnoDea, Chandra & Hardiningsih Irianto. (2024, November, 9). LAPAS Overkapasitas 89 Persen, DPR Desak Pemerintah Tambah Fasilitas dan Berantas Pungli. (<https://www.suara.com/news/2024/11/09/130310/LAPAS-overkapasitas-89-persen-dpr-desak-pemerintah-tambah-fasilitas-dan-berantas-pungli>) Diakses pada 17 November 2024.
- Kurniawan, Muhamad budi. (2023 Juli 7). Penganiayaan Napi hingga Tewas oleh Pejabat LAPAS Nunukan Ditonton Anggota. (<https://news.detik.com/berita/d-6810563/penganiayaan-napi-hingga-tewas-oleh-pejabat-LAPAS-nunukan-ditonton-anggota>). Diakses pada 17 November 2024.
- LAPAS Kediri. Profil LAPAS Kediri. (<https://www.LAPASKediri.com/profil-LAPAS-kediri-gambaran-umum/>). Di akses 8 Januari 2025.
- Mapikornews. (2024). Mengatasi Kekerasan antar Narapidana di LAPAS: Pendekatan Holistik untuk Pencegahan, Penindakan, dan Penegakan Hukum. (<https://mapikornews.com/opini/mengatasi-kekerasan-antar-narapidana-di-LAPAS-pendekatan-holistik-untuk-pencegahan-penindakan-dan-penegakan-hukum/>). Di akses 8 Januari 2025.

- Paralegal.id (2018,Juni,22). Kekerasan.
<https://paralegal.id/pengertian/kekerasan/#:~:text=Kekerasan%20adalah%20setiap%20perbuatan%20penyalahgunaan,orang%20pingsan%20atau%20tidak%20berdaya>). Di akses pada 19 2024
- Paralegal.id(2022,Agustus,3).Lembaga Pemasyarakatan
<https://paralegal.id/pengertian/lembaga-pemasyarakatan/>),diakses pada 19 2024
- Puspitasari,Devi. (2024,September,1).6 Napi Keroyok Tahanan Baru di Rutan Depok Dipindah ke LAPAS Nusakambangan.
<https://news.detik.com/berita/d-7519341/6-napi-keroyok-tahanan-baru-di-rutan-depok-dipindah-ke-LAPAS-nusakambangan>).
 Diakses pada 09 November 2024.
- Rutan kelas IIB Pelaihari. (2024). Pentingnya Hak Asasi Manusia Di Pemasyarakatan.<https://rutanpelaihari.kemenkumham.go.id/infogr afis-index/pentingnya-hak- asasi-manusia-di-pemasyarakatan>).
 Diakses 3 Januari 2025
- Subagio,Afnan. (2022,Oktober,31). Kronologi Napi LAPAS Kediri Tewas Dikeroyok Teman Satu Sel, Dipicu Dendam dan Saling Ejek.
<https://jatim.inews.id/berita/kronologi-napi-LAPAS-kediri-tewas-dikeroyok-teman-satu-sel-dipicu-dendam-dan-salingejek>).
 Diakses pada 25 September 2024.

Skripsi

- Mayani Nur Halizah Adi.(2022). Analisis Penerapan Undang-undang Nomer 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang (S1). Magelang: Universitas TIDAR.
- Firnanda Deni. (2022). Sistem Pemasyarakatan Dalam Membina Narapidana Ditinjau Menurut UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (S1). Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam.

Peraturan Perundang-undangan

- DPR.(2022). UU 22 Tahun 2022. Tentang Pemasyarakatan.
- Menteri Hukum dan HAM. (2018). No. 3 Tahun 2018. Tentang Tata Kelola Pemasyarakatan.
- Menteri Kehakiman. (1995). No M-01.-PR.07.03 Tahun 1995.Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyaraktan.
- Presiden.(2021). No 99 tahun 2012. Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.